SEKRETARIAT **BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT** **SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN**	**NOMOR SOP**	617/HM.01/Umper
	TANGGAL PEMBUATAN	Januari 2022
	TANGGAL REVISI	Februari 2023
	TANGGAL EFEKTIF	Maret 2023
	DISAHKAN OLEH	**Kepala Badan Pendapatan Daerah** **Provinsi Jawa Barat** Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si. Pembina Utama Madya
	NAMA SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. UUD Tahun 1945 pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 2. UU No, 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. PP No. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 6. Permendagri No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda 7. Permenpanrb No. 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	1. Memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tidak minder, teliti, hati-hati serta memiliki rasa tanggung jawab. 3. Memiliki *Self control* yang baik (tidak mudah marah, tidak terpancing untuk berbuat dan berkata kasar, mampu mengendalikan gerakan tubuh yang mengesankan serta tidak terpancing untuk berbicara hal yang bersifat negatif). 4. Memiliki kemampuan *public speaking* yang baik. 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer serta aplikasi perkantoran. 6. Memiliki rasa empati yang tinggi. 7. Memiliki kemampuan *Active Listening.*
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Permohonan Informasi PPID 2. SOP Surat Masuk	1. Alat tulis kantor 2. Ruangan PPID
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

BDD7E00853

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BDD7E00853

No	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap Tanggapan Keberatan Informasi oleh atas PPID Bapenda Jabar , maka dalam waktu 14 hari kerja dapat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	mulai				(1) Surat permohonan sengketa informasi, (2) Formulir permohonan penyelesaiaan sengketa informasi, (3) Berkas / dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi.	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah diisi lengkap	
2	Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Bapenda Jabar untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat					Formulir pengajuan keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	
3	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkannya kepada Atasan PPID Bapenda Jabar					(1) Daftar informasi publik, (2) Surat keberatan informasi, (3) Notulensi rapat, (4) Nota dinas	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	SOP Surat masuk
4	Atasan PPID Menugaskan PPID Bapenda Jabar untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi.					(1) Informasi / Dokumen, (2) Surat Keberatan Informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	
5	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat					1. Nota Dinas / Surat Perintah. 2. Informasi/dokumen	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	
6	Sidang penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh PPID Bapenda Jabar bersama tim yang ada				selesai	Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik diberikan dalam	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi informasi Provinsi Jawa Barat atas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BDD7E00853
BDD7E00853

	dalam surat kuasa.					jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima		penyelesaian sengketa informasi publik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BDD7E00853
BDD7E00853

BDD7E00853

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BDD7E00853

BDD7E00853

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BDD7E00853